



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN DAERAH TERTINGGAL,
TRANSMIGRASI, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, DAN
BADAN NASIONAL Pencarian Pertolongan/BASARNAS)**

Tahun Sidang	: 2025 – 2026
Masa Sidang	: III
Rapat	: Ke – 7
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Selasa, 10 Februari 2026
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 13.47 WIB s.d 15.05 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) Gedung Nusantara
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. 2. Membahas Program Kerja Tahun Anggaran 2026.
Ketua Rapat	: Lasarus, S.Sos.,M.Si
Sekretaris	: Nina Herlina, S.H
Hadir Anggota	: ... dari 48 orang Anggota Komisi V DPR RI.
Hadir Mitra	: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 13.47.WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada hari ini adalah Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dan Membahas Program Kerja Tahun Anggaran 2026.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan permukiman, atas capaian serapan APBN TA 2025 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI, dimana capaian per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

KEMENTERIAN	REALISASI KEUANGAN	REALISASI FISIK
Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman	96,21 %	98,60 %

2. Komisi V DPR RI mendukung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan Program Prioritas Nasional pada APBN Tahun 2026 melalui penguatan tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas program perumahan, khususnya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pengembangan pembiayaan kreatif (*creative financing*) termasuk pengurangan beban sektor perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta percepatan penyediaan hunian pascabencana melalui peningkatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, guna menjamin ketepatan sasaran, mencegah terjadinya penyimpangan, dan mempercepat pemulihan fungsi sosial, ekonomi, serta pelayanan dasar masyarakat secara berkelanjutan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.05.WIB.

Jakarta, 10 Februari 2026

**MENTERI PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN,**
ttd

MARUARAR SIRAIT

KETUA RAPAT,
ttd

L A S A R U S